



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PENGELOLAAN NEGARA DALAM PROGRAM PC-PEN TAHUN 2020

Sudarto

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi

**Regional Public Sector Conference (RPSC) V
Ikatan Akuntan Indonesia**

Selasa, 7 Desember 2021

PERKEMBANGAN KASUS COVID-19

Kasus Harian Covid-19 pada 5 Des hanya 169 dan rata-rata kasus harian 7 hari terakhir adalah 250

- *Positivity rate* 7DMA menurun menjadi 0,13%. Tingkat kematian sudah berada pada kisaran 8 per hari (7DMA)
- Testing sebesar 249,21 ribu spesimen pada 5 Des, perlu didorong untuk menahan laju penyebaran yang sudah baik (target 579 ribu/hari).

Per 5 Des

4,257 Juta

KASUS KUMULATIF

143,87 ribu

KEMATIAN

7,53 ribu

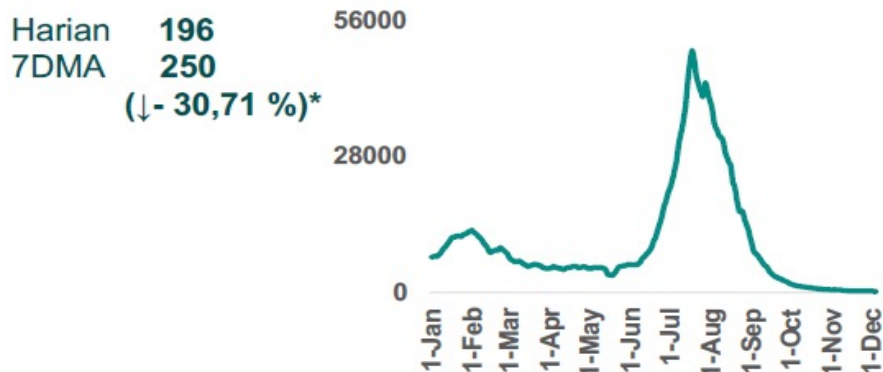
KASUS AKTIF

4,106 juta

PASIENT SEMBUH

KASUS KONFIRMASI 4.257.685

Harian 196
7DMA 250
(↓ -30,71%)*



SPEKIMEN DIPERIKSA 55.863.036

Harian 249.214
7DMA 276.664
(↑ 0,42%)*

7DMA Pos-Rate 0,13%

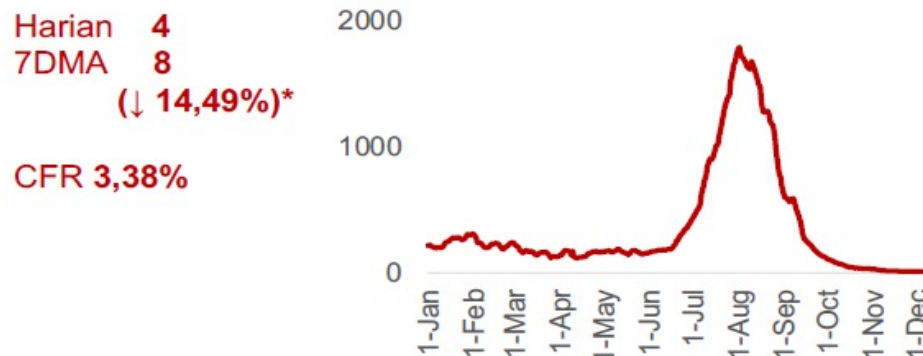
	NAAT	Antigen
Harian	45.709	203.505
7DMA	50.227	226.437



KEMATIAN 143.867

Harian 4
7DMA 8
(↓ 14,49%)*

CFR 3,38%

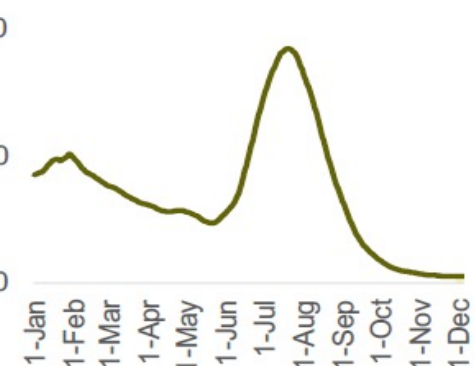


RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT

Harian 2.465
7DMA 2.543
(↓ -4,18%)*

BOR 7DMA 3%

	Isolasi	Intensif
Harian	2.078	387
7DMA	2.148	396



DAMPAK COVID-9 MULTI DIMENSI, MENGGUNCANG PEREKONOMIAN DAN MENIMBULKAN TEKANAN FISKAL YANG SIGNIFIKAN



Terjadi *opportunity loss*, karena pertumbuhan ekonomi berkontraksi -2,07% jauh dibawah ekspektasi 5,3% (2020)

Ketahanan Fiskal mengalami tekanan yang cukup dalam

Nilai Ekonomi Nasional yang Hilang
Akibat Pandemi di Tahun 2020

**TERJADI OPPORTUNITY LOSS
KARENA PERTUMBUHAN
EKONOMI TUMBUH JAUH
DIBAWAH EKSPEKTASI**

1

Penerimaan perpajakan melemah: hanya mencapai 8,33% PDB dibawah kondisi normal 10,2% PDB (rata-rata 2015-2019)

2

Defisit meningkat signifikan: mencapai 6,14% PDB dibawah kondisi normal 2,3% PDB (rata-rata 2015-2019)

3

Rasio utang meningkat tajam: mencapai 39,4% PDB dibawah kondisi normal 29,04% PDB (rata-rata 2015-2019)

**APBN TELAH BEKERJA KERAS MENAHAN AGAR
TERHINDAR DARI PEMBURUKAN YANG TERLALU DALAM**

PANDEMI COVID-19 MEMBERIKAN EFEK DOMINO PADA ASPEK SOSIAL, EKONOMI, & KEUANGAN



Memberikan tekanan kepada perekonomian baik dari sisi *supply* maupun *demand*



KESEHATAN

Penyebaran COVID-19 yang mudah, cepat, dan luas **menciptakan krisis kesehatan** dengan belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis.



SOSIAL

Langkah untuk *flattening the curve* memiliki konsekuensi pada: **berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja** di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal.



EKONOMI

Kinerja ekonomi menurun tajam: konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor berkontraksi.
Pertumbuhan ekonomi melambat/menurun tajam



KEUANGAN

Volatilitas sektor keuangan muncul seiring turunnya *investor confidence* dan terjadinya *flight to quality*. Sektor keuangan juga terdampak karena penurunan kinerja sektor riil; NPL, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan.

INDONESIA MENGAMBIL LANGKAH CEPAT DAN TERUKUR

Untuk menanggulangi dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi



SIGNALING

Pandemi COVID-19 memberikan disrupsi yang luar biasa pada berbagai aspek kehidupan

KESEHATAN

SOSIAL

EKONOMI

KEUANGAN



LEADERSHIP

Dampak COVID-19 luar biasa, direspon cepat dengan *extraordinary policy*

- Penerbitan Perppu No.1/2020 → UU No.2/2020
- Fleksibilitas APBN, pelebaran defisit APBN menjadi 6,34% PDB



ACTION

Perubahan APBN dan penyediaan stimulus untuk dapat mengatasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi

Penyaluran Program PEN disertai langkah simultan perluasan stimulus dan penguatan program agar lebih *simple* dan implementatif

Pemerintah membangun sinergi antar institusi dan seluruh elemen bangsa

KSSK

Menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan

BANK INDONESIA

Antara lain skema *burden sharing*

LEMBAGA PENGAWAS

Menjaga akuntabilitas dan memastikan *good governance*

DPR

Mitra Pemerintah dalam memformulasikan dan menetapkan kebijakan

MASYARAKAT

Memberi masukan dan mengawasi pelaksanaan APBN & program PEN



LATAR BELAKANG

- Pandemi COVID-19 memicu **krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi**
- Pandemi COVID-19-19 menciptakan **kondisi kegentingan yang memaksa**
- Pemerintah perlu mengambil **langkah cepat & luar biasa (extraordinary)**

QUICK RESPONSES

Penerbitan

PERPPU No. 1/2020

sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi Pandemi COVID-19.

Saat ini, PERPPU tersebut telah disahkan menjadi

UU No. 2/2020

BEBERAPA KEBIJAKAN DALAM PERPPU

Kebijakan Keuangan Negara

- Penyesuaian **batas defisit APBN**
- Penggunaan **sumber pendanaan alternatif** anggaran
- Penyesuaian **mandatory spending**, pergeseran dan **refocusing** anggaran pusat dan daerah
- Program penerbitan **SBN** dan pinjaman dalam rangka **pembiayaan tambahan defisit**
- **Insentif** dan fasilitas perpajakan
- Pelaksanaan **Program Pemulihan Ekonomi Nasional** untuk kesinambungan sektor riil dan sektor keuangan.

Kebijakan Sektor Keuangan

- **Perluasan kewenangan KSSK** dan ruang lingkup rapat KSSK
- Penguatan kewenangan BI, termasuk **membeli SBN jangka panjang di pasar perdana**
- **Penguatan kewenangan OJK dan LPS** untuk mencegah risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan serta perlindungan nasabah perbankan
- **Penguatan kewenangan Pemerintah** untuk memberikan **pinjaman kepada LPS** dalam menangani **permasalahan perbankan dan stabilitas sistem keuangan**

DINAMIKA APBN DIMASA PANDEMIK



Di tengah menghadapi Pandemi, tetap melakukan reformasi untuk penguatan fondasi



“EXTRAORDINARY POLICY”

Dampak COVID-19 luar biasa, harus direspon dengan *extraordinary policy*



“REOPENING POLICY”

Komitmen untuk dapat mengatasi COVID-19 dan recovery ekonomi



“RECOVERY & REFORM POLICY”

momentum untuk reformasi penguatan fondasi

IMMEDIATE RESPONSE: KEBIJAKAN EXTRAORDINARY

- Perpu No.1/2020 menjadi UU No.2/2020;
- Stimulus penanganan COVID-19 dan Program PEN, defisit APBN melebar 6,34% PDB

PEMBERIAN STIMULUS: MENDUKUNG REOPENING

Komite PEN, Perluasan stimulus dan rekonstruksi program agar lebih sederhana dan implementatif sehingga dapat segera mungkin dapat dieksekusi

AKSELERASI RECOVERY & REFORMASI

- Mengakselerasi *recovery* melalui keberlanjutan kebijakan pemulihan ekonomi
- Mendorong transformasi melalui reformasi

2020

2021

REALISASI PROGRAM PEN 2020 MENCAPAI Rp575,85 T (82,8% DARI Rp695,2 T)

Output dan Tujuan program tercapai dengan tetap menjaga *governance*



KESEHATAN

Realisasi Audited
Rp62,67 T

- **Tujuan:** insentif nakes serta belanja intervensi penanganan Covid-19 (sarpras, biaya klaim, dan vaksin)
- Terdapat anggaran untuk pengadaan awal Vaksin Sinovac sebesar Rp633,84 M

PERLINDUNGAN SOSIAL

Realisasi Audited
Rp216,59 T

- **Tujuan:** dukungan daya beli untuk menekan laju peningkatan kemiskinan dan kesenjangan
- Target untuk KPM pada DTKS, pekerja terdampak, serta peserta dan tenaga didik

SEKTORAL K/L DAN PEMDA

Realisasi Audited
Rp65,22 T

- **Tujuan:** merupakan program untuk dukungan pemda serta K/L dalam proses pemulihan ekonomi
- Termasuk dukungan pariwisata, padat karya K/L, DID Pemulihan, DAK Fisik, serta Food Estate

DUKUNGAN UMKM

Realisasi Audited
Rp112,26 T

- **Tujuan:** menopang permodalan dan *cashflow* UMKM agar tetap *survive* dan dapat melakukan *jump start* pada masa pemulihan ekonomi
- Termasuk **Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)** untuk 12 Juta

PEMBIAYAAN KORPORASI

Realisasi Audited
Rp60,73 T

- **Tujuan:** dukungan korporasi melalui BUMN dan penjaminan kredit modal kerja
- **PMN untuk 6 BUMN dan 2 Lembaga (LPEI dan LPI/INA) serta Pinjaman untuk 5 BUMN dalam Rangka PEN** telah direalisasi pada akhir Desember 2020

INSENTIF USAHA

Realisasi Audited
Rp58,38 T

- **Tujuan:** insentif perpajakan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha serta daya beli masyarakat (PPh 21 DTP)
- Insentif fiskal memberikan pengaruh terhadap kelangsungan usaha WP



PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2020

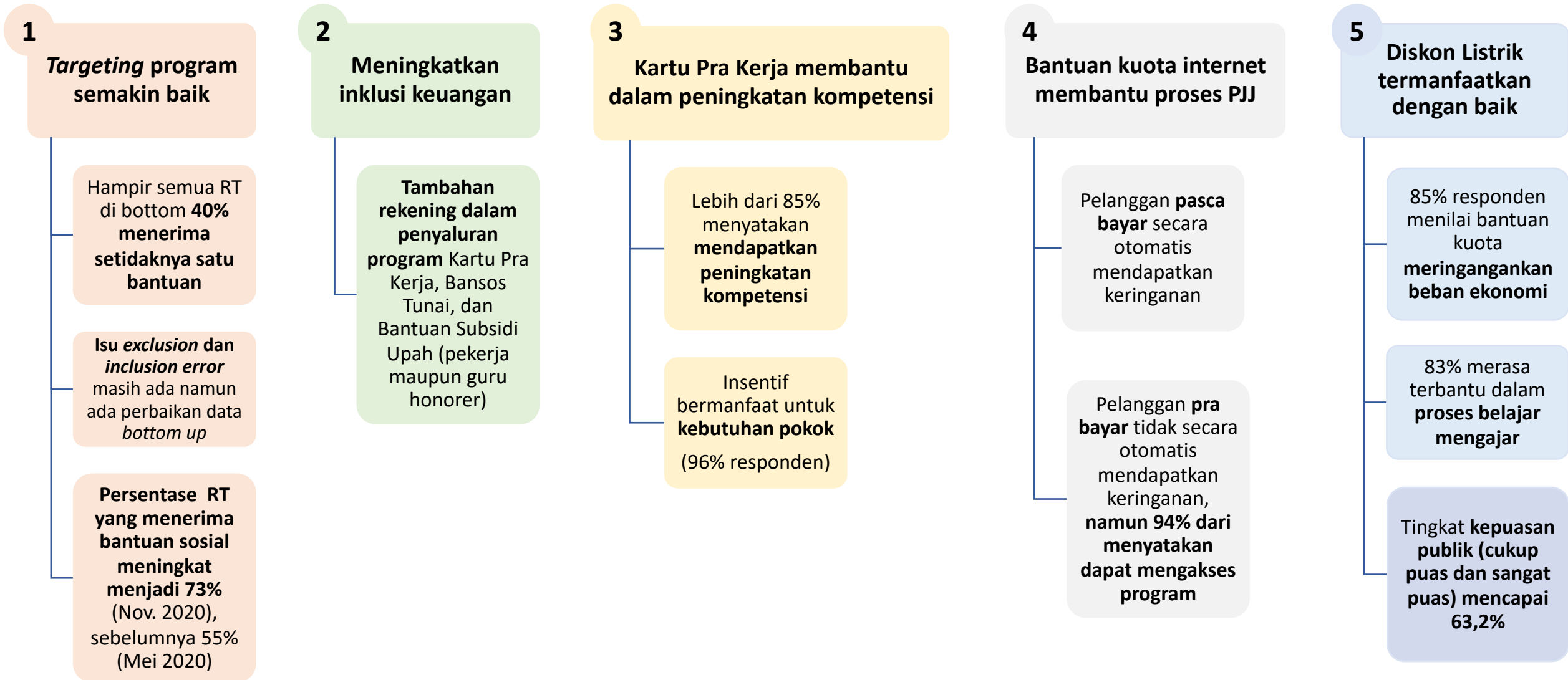
membantu masyarakat khususnya yang miskin dan rentan (desil 1-4) serta kelas menengah terdampak

		Program Keluarga Harapan (PKH)	Kartu Sembako	Subsidi Listrik	Bansos Sembako Jabodetabek	Bansos Tunai Non Jabodetabek	BLT Desa	Kartu Pra Kerja	Bantuan Beras	Ekspansi Bansos Tunai	BSU Tenaga Kerja	BSU Guru Honoror	Subsidi Kuota Internet		
Desil Pendapatan Masyarakat	6+							5,6 juta Orang			12,4 juta Pekerja	2,6 juta Guru Honoror	51 Juta Penerima		
	5			450 VA: 24 juta RT 900 VA: 7,2 juta RT	DKI: 1,3 jt KPM Bodetabek: 600 rb KPM	9,2 juta KPM	8 juta KPM								
	4						Pelatihan: Rp1 jt/bln Insentif: Rp600 rb/bln								
	3	19,4 juta KPM					Apr-Jun: Rp600 rb/bln Jul-Des: Rp300 rb/bln	Apr-Jun: Rp600 rb/bln Jul-Des: Rp300 rb/bln	Apr-Jun: Rp600 rb/bln Jul-Des: Rp300 rb/bln	Survei (3x): Rp50 rb		9 juta KPM			
	2	10 juta KPM						di luar Penerima PKH, Kartu Sembako, Bansos Sembako, Bansos Tunai, dan Kartu Pra Kerja		10 juta KPM PKH	Rp500 ribu/KPM	Rp600Rb/Bulan	Rp600Rb/Bulan		
	1	indeks bantuan per komponen naik 25%	Rp200rb/bln	450 VA Gratis 900 VA Diskon 50%	di luar penerima PKH dan Kartu Sembako	di luar penerima PKH dan Kartu Sembako			15 kg/KPM/bln	KPM Kartu Sembako yang bukan Penerima PKH	gaji di bawah Rp5 juta dan terdaftar pada BPJS TK	Guru Honoror pada Kemendikbud dan Kemenag	Peserta dan Tenaga Ddidik		
Jangka Waktu	bulanan selama 12 bulan	bulanan selama 12 bulan	9 bulan (April-Des)	9 bulan (April-Des)	9 bulan (April-Des)	9 bulan (April-Des)	April - Okt/Nov Insentif 4 bulan	3 bulan (Agustus-Oktober)	Sekali penyaluran	4 bulan (Sept-Des)	4 bulan (Sept-Des)	4 bulan (Sept-Des)			
Realisasi audited	Rp36,68 T	Rp39,38 T	Rp11,45 T	Rp 7,09 T	Rp 32,60 T	Rp 23,74 T	Rp18,25 T	Rp5,26 T	Rp4,51 T	Rp29,48 T	Rp4,08 T	Rp4,06 T			

HASIL SURVEI PELAKSANAAN PEN KLUSTER PERLINDUNGAN SOSIAL



Program perlinsos dapat membantu daya beli masyarakat ditengah kondisi krisis



Sumber: 1: Indonesia High-frequency monitoring of COVID-19 Impacts Round 3 & 4, World Bank

2. Pemantauan PKH, Kartu Sembako dan BST Sekretariat Tim Pengendali Bantuan Sosial Nontunai

3: Hasil Survei Evaluasi I Kartu Pra Kerja, PMO Kartu Pra Kerja

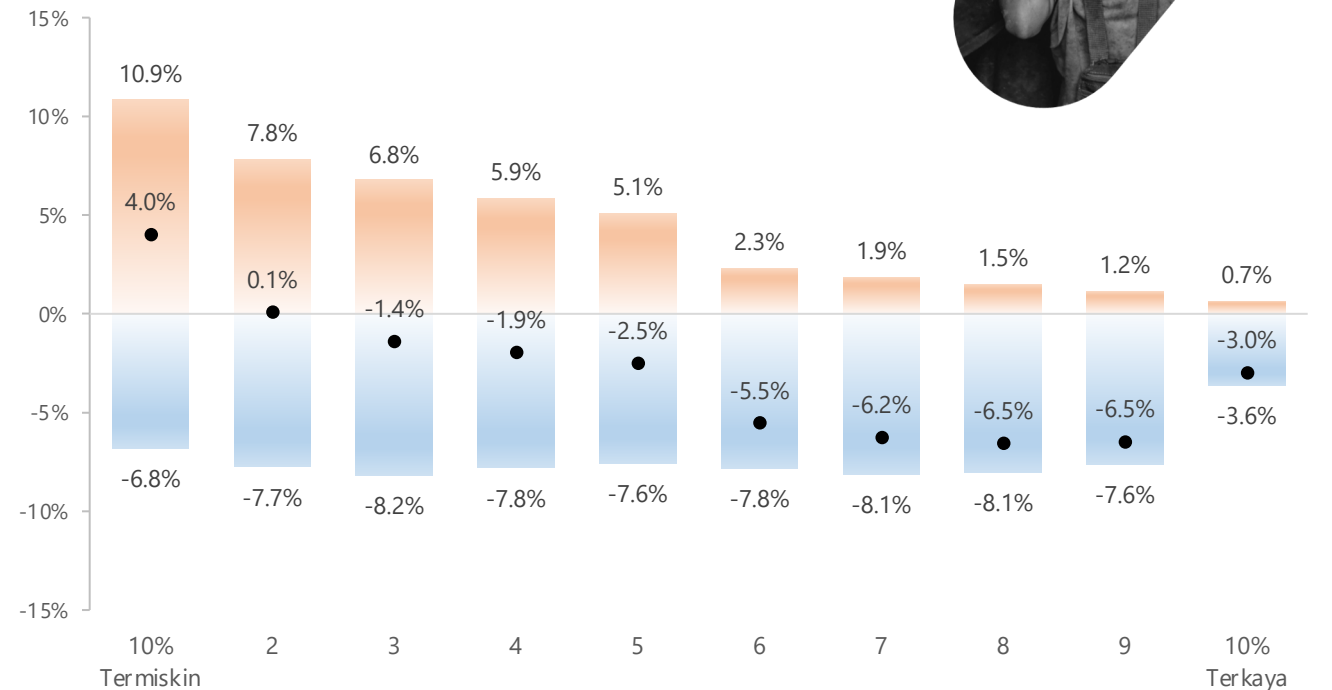
4: Survei Program Stimulus Keringanan Tagihan Listrik, TNP2K

5: Survei Nasional Persepsi Publik Bantuan Kuota Internet, Arus Survei Indonesia

Program Perlinsos PEN efektif dalam memberikan bantalan perekonomian pada kelompok masyarakat termiskin



- Simulasi perubahan pengeluaran rumah tangga dan manfaat perlinsos menunjukkan program perlinsos PEN cukup efektif dalam menjaga tingkat konsumsi rumah tangga miskin dan rentan
- Program Perlinsos PEN mampu menahan kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga tingkat konsumsi kelompok termiskin.
- Tingkat kemiskinan mampu dikendalikan menjadi 10,19% pada Sept-20. Tanpa program PEN, Bank Dunia memprediksi angka kemiskinan Indonesia 2020 dapat mencapai 11,8%, artinya **PEN 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang dari kemiskinan.**



■ Perubahan Pengeluaran Karena Covid-19 ■ Perubahan Pengeluaran Karena Perlinsos ● Net Perubahan Pengeluaran RT

Sumber: Perhitungan BKF, atas realisasi berbagai program Perlinsos 2020

Catatan: a) simulasi dilakukan terhadap pertumbuhan konsumsi RT nominal 2020 menggunakan Susenas 2019. b) distribusi Program Perlinsos dilakukan berdasarkan penerima manfaat di Susenas

DAMPAK COVID-19 TERHADAP DUNIA USAHA (Hasil Survey BPS)



Program PEN sesuai dengan kebutuhan dunia usaha selama pandemi

Hasil Survei

- Sebagian besar survei dunia usaha program PEN masih **dalam tahap implementasi awal**
- Secara umum berbagai survei menggambarkan **dampak negatif dari Covid-19 terhadap dunia usaha**



Dilakukan pada **10-26 Juli 2020**

jumlah responden 34.559
(25.256 UMK, 6.821 UMB dan 2.482 usaha pertanian)

59,4% beroperasi seperti biasa
31,8% mengurangi kegiatan dan kapasitas serta WFH
8,8% berhenti beroperasi

Di 5 provinsi dengan kasus Covid-19 tertinggi, secara rata-rata **50% perusahaan masih beroperasi seperti biasa**

Sekitar **82,29%** UMB dan **84,20%** UMK mengalami penurunan pendapatan

Hanya 19% pelaku usaha mampu bertahan **lebih dari 3 bulan**



Bantuan yang Diperlukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Usah Menengah dan Besar (UMB)

Berdasarkan survei dunia usaha yang dilakukan BPS, ada perbedaan prioritas kebutuhan bantuan antara UMK dan UMB

UMK



69,02%	<i>Bantuan modal usaha</i>
41,18%	<i>Keringanan tagihan listrik</i>
29,98%	<i>Relaksasi pinjaman</i>
17,21%	<i>Kemudahan administrasi pinjaman</i>
15,07%	<i>Penundaan pajak</i>

UMB



43,53%	<i>Keringanan Tagihan Listrik</i>
40,32%	<i>Relaksasi Pinjaman</i>
39,61%	<i>Penundaan Pajak</i>
35,07%	<i>Bantuan Modal</i>
14,44%	<i>Kemudahan administrasi pinjaman</i>

PEN telah mengakomodasi kebutuhan UMK dan UMB

- Pembiayaan Investasi kepada Koperasi (LPDB)
- Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM)
- Penempatan dana, penjaminan & subsidi bunga
- Diskon listrik
- Relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (POJK 11 dan 14, 2020)
- PERMENKO 6/2020 kemudahan administrasi pengajuan KUR
- PPh Final untuk UMKM Ditanggung Pemerintah
- PPh 21 Ditanggung Pemerintah
- Pengembalian Pendahuluan PPN
- Pembebasan PPh 22 Impor
- Pengurangan angsuran PPh 25
- Fasilitas PPh Badan Turun Tarif
- Penempatan dana dan penjaminan

Catatan: Responden dapat memilih paling banyak 2 bantuan.

HASIL SURVEI PELAKSANAAN PEN KLUSTER DUKUNGAN UMKM

Intervensi PEN membuat mayoritas penerima bertahan selama pandemi



Survei Evaluasi Penempatan dana PEN

Responden 3000 UMKM penyaluran penempatan dana PEN terbesar

Desember 2020

Highlight Survei

1. Intervensi PEN membuat **mayoritas responden dapat bertahan (tidak mengalami penurunan omzet dan keuntungan)**, bahkan 29% responden mengalami peningkatan omzet, 26 % mengalami peningkatan keuntungan.
2. **Penggunaan Bantuan Paling Utama: 30%** bahan baku, 28% barang modal, dan 13% kebutuhan pribadi dan keluarga

Survei BPUM KemenkopUKM -TNP2K

Responden Kuantitatif 1.261 Usaha Mikro dan 93 informan lainnya

Desember 2020

Highlight Survei

1. **Mayoritas (69%)** responden telah mengetahui adanya program → sosialisasi berjalan baik
2. **Lebih dari 60% penerima BPUM tidak memiliki cadangan kas** lebih dari 10 hari → BPUM sudah tepat sebagai *cash buffer*
3. **Penggunaan BPUM: 88,5% bahan baku, 23,4% alat produksi, dan 22,8% konsumsi**

Survei BPUM PNM - TNP2K

9.852 responden di Seluruh Provinsi di Indonesia

1 – 27 Februari 2021

Highlight Survei

1. **98,9% responden menggunakan untuk keperluan usaha**, dengan rata-rata sebesar Rp 1,7 juta.
2. Diantara responden tersebut, 96% menggunakan untuk **bahan baku**, 66,3%, menggunakan untuk **membayar atau sewa alat produksi**, 46,4% menggunakan untuk **membayar utang usaha**, dan 38,2% **membayar pekerja**.

PROSES PELAKSANAAN PEN 2020 DI KEMENTERIAN KEUANGAN

Proses money serta kerjasama dengan APH berlanjut pada PEN 2021



PENETAPAN DASAR HUKUM PERUBAHAN APBN DAN PROGRAM PEN

- Program PEN diatur dalam PP 23/2020 sebagai implementasi PERPPU 1/2020 → UU NO.2/2020
- Telah dilakukan Perubahan Perpres 54/2020 menjadi Perpres 72/2020 untuk menampung kebutuhan pendanaan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp695,2 T → pelebaran defisit dari 5,07% PDB menjadi 6,34% PDB



KONSULTASI DENGAN DPR RI

- Perubahan APBN 2020 yang ditetapkan di dalam Peperes 72/2020 telah telah dibahas dan dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI (Komisi XI dan Badan Anggaran) termasuk kebutuhan anggaran dan kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional



KERJASAMA DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH)

- Komunikasi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Auditor dalam rangka monitoring pelaksanaan PEN (KPK, BPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan BPKP)
- Kerjasama dengan APH turut melibatkan Inspektorat Jenderal K/L



PEMBENTUKAN POKJA MONITORING

- Monitoring dan update realisasi PEN
- Identifikasi kendala dan permasalahan
- Tindak-lanjut untuk upaya akselerasi dan efektivitas PEN (*debottlenecking*)
- Analisis dampak program PEN

3 KARAKTER PENYERAPAN PROGRAM PEN



PROGRAM PEN EXISTING (SIMPLE DAN IMPLEMENTATIF)

- Untuk PROGRAM *EXISTING* PEN, SEPERTI PKH DAN KARTU SEMBAKO, PENYERAPANNYA CUKUP OPTIMAL
- Telah didukung data yang memadai, mekanisme *delivery* yang telah siap
- Tidak terlalu banyak merubah regulasi dan lebih implementatif, serta proses penganggaran yang cepat



Penyerapan relatif cepat dan optimal

PROGRAM PEN USULAN BARU (DATA VALID DAN *DELIVERABLE*)

MODERATE

Program baru, (didukung data yang valid (*by name by address*), infrastruktur *delivery* tersedia, perubahan regulasinya tidak terlalu banyak dan proses penganggaran dapat dilakukan secara cepat



Penyerapan butuh waktu namun cukup optimal

PROGRAM PEN USULAN BARU (DATA BELUM TERSEDIA DAN MEKANISME *DELIVERY* BELUM SIAP)

CHALLENGING

- Belum didukung data yang valid
- Infrastruktur *delivery* belum tersedia
- Perlu penambahan dan revisi regulasi rumit karena berbenturan dengan berbagai aturan
- Perlu proses penganggaran



Penyerapan butuh waktu lama dan apabila terserap berpotensi kurang efektif

LESSON LEARNED PANDEMIC COVID-19

memberi pembelajaran yang sangat berharga, untuk segera berbenah agar lebih produktif namun lebih efisien



1

PENTINGNYA INOVASI POLA KERJA AGAR TETAP PRODUKTIF DITENGAH TERBATASNYA MOBILITAS FISIK (optimalisasi ICT atau digitalisasi birokrasi):



2

PENTINGNYA PENYEMPURNAAN PROGRAM AGAR LEBIH COMPATIBLE DENGAN KONDISI KEDARURATAN : Program yang simple dan implementatif (Kesehatan, Perlinsos, Program pemulihan ekonomi)



3

MENYADARKAN KITA SEMUA HANYA DENGAN GOTONG ROYONG DAN SHARING BURDEN DAPAT MENGUATKAN, agar mampu bertahan sekaligus percepatan *recovery* sosial- ekonomi. mensinergikan kebijakan moneter, fiskal, sektor keuangan dan sektor riil



4

PENANGANAN COVID-19 JUGA MENJADI MOMENTUM REFORMASI UNTUK KELUAR DARI MIT (transformasi ekonomi, daya saing dan kapasitas produksi)



Realisasi PEN 2021 s.d. 3 Desember mencapai Rp513,17 T atau 68,9% dari Pagu Rp744,77 T meningkat Rp103,18 T dari realisasi Q3 Rp409,98 T



KESEHATAN

Pagu
Rp214,96 T

Realisasi
Rp140,52 T (65,4%)

Real s.d. Q3: Rp104,08 T

Manfaat

- Penggunaan untuk RS darurat Asrama Haji dan Pademangan
- Pembagian Paket Obat untuk Masyarakat dan Penebalan PPKM
- Biaya perawatan untuk 768,86 Ribu Pasien
- Insentif nakes untuk 1,30 Juta Nakes pusat dan Santunan Kematian untuk 521 Nakes
- Pengadaan 284,14 Juta dosis vaksin
- Bantuan luran JKN untuk 34,71 Jt org

Sumber Data: Kemenkeu

PERLINDUNGAN SOSIAL

Pagu Rp186,64 T

Realisasi Rp142,63 T (76,4%)

Manfaat

Real s.d. Q3: Rp117,30 T

- PKH untuk 10 Jt KPM dan Kartu Sembako untuk 18,1 Jt KPM
- BST untuk 9,99 Jt KPM dan BLT Desa untuk 5,62 Jt KPM
- Kartu Pra Kerja untuk 5,96 Jt Orang
- Bantuan Kuota Internet untuk 65,19 Jt penerima
- Bantuan UKT untuk 347,31 Rb penerima
- Subsidi Listrik untuk 32,6 Jt Penerima
- BSU untuk 7,48 Juta Pekerja
- Bantuan beras untuk 28,8 Jt dan sembako PPKM 4,86 Jt KPM

DUKUNGAN UMKM DAN KORPORASI

Pagu Rp162,40 T

Realisasi Rp85,50 T (52,6%)

Manfaat

Real s.d. Q3: Rp66,69 T

- Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 12,8 Jt usaha
- IJP untuk 2,33 Juta UMKM dan 43 Korporasi
- Penempatan Dana bank dengan total penyaluran kredit Rp455,31 T kepada 5,48 juta debitur
- Subdisi Bunga KUR untuk 7,02 Juta debitur dan Non-KUR untuk 15,05 Juta debitur
- PMN untuk HK, Pelindo III, KIW, dan LPI sebesar Rp23,39 T
- Telah disalurkan bantuan PKL kepada 1 juta usaha

PROGRAM PRIORITAS

Pagu Rp117,94 T

Realisasi Rp80,68 T (68,4%)

Manfaat

Real s.d. Q3: Rp62,50 T

- Padat Karya K/L untuk 1,56 Juta Naker
- Pariwisata a.l. sertifikasi CHSE serta akomodasi nakes dalam rangka peningkatan industri perhotelan
- Ketahanan Pangan a.l. untuk pembangunan bendungan dan food estate
- ICT a.l. Pemutakhiran DTKS
- Fasilitas Pinjaman Daerah Rp10 T melalui PT. SMI

INSENTIF USAHA

Pagu Rp62,83 T

Realisasi Rp63,84 T (101,6%)

Manfaat

Real s.d. Q3: Rp59,41 T

- PPh 21 DTP untuk 87.037 Pemberi Kerja
- PPh Final UMKM DTP untuk 134.503 UMKM
- Pembebasan PPh 22 Impor untuk 9.572 WP
- Pengurangan Angsuran PPh 25 untuk 57.903 WP
- Pengembalian Pendahuluan PPN untuk 2.709 WP
- Penurunan Tarif PPh Badan manfaat untuk seluruh WP
- PPN DTP Properti untuk 941 Penjual, PPnBM Mobil untuk 6 Penjual, dan PPN DN sewa Outlet untuk 874 WP
- BM DTP untuk nilai impor Rp2,68 T



Realisasi PEN 2021 mengalami peningkatan

Alokasi Perlinsos dan Kesehatan terserap cukup signifikan



ENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KESEHATAN

PROGRAM	PAGU	REAL	%
Diagnostik (Testing & Tracing)	4.50	3.11	69.0
Therapeutic	87.99	67.14	76.3
a.l. - Biaya Klaim Perawatan	63.51	49.61	78.1
- Insentif & Santunan Nakes	18.94	15.19	80.2
- RS Darurat	2.75	0.76	27.5
Vaksinasi	57.75	28.77	49.8
a.l. Pengadaan Vaksin	47.61	26.00	54.6
Pelaksanaan Vaksinasi	6.97	2.71	38.9
Penelitian Lab Covid-19	0.67	0.04	5.8
BNPB	1.99	1.69	85.2
Komunikasi	0.50	0.28	55.1
Sarpras Lab Covid-19	1.60	0.45	28.2
Penebalan PPKM	0.79	0.62	78.4
Bantuan Iuran JKN PBU	2.43	1.44	59.2
Insentif Perpajakan Kesehatan	20.85	11.21	53.8
Alokasi BOK untuk Tracing/APD	3.30	2.52	76.4
Penanganan Covid Lainnya di Daerah	32.61	23.25	71.3
TOTAL	214.96	140.52	65.4

Real Kesehatan s.d. Q3: Rp104,08 T

PERLINSOS

PROGRAM	PAGU	REAL	%	Output
PKH	28.31	27.69	97.8	10 Jt
Bantuan Beras	3.58	-	-	28.8 jt
Kartu Sembako	49.89	33.30	66.7	18.1 Jt
Sembako PPKM	7.08	2.92	41.2	4.86 Jt
BST	17.46	17.23	98.7	9.99 Jt
Kartu Pra Kerja	21.20	21.15	99.7	5.96 Jt
Diskon Listrik	9.49	7.51	79.1	32.6 Jt
BLT Desa	28.80	19.71	68.5	5.62 Jt
BSU	8.80	7.48	84.9	7.48 Jt
Subsidi Kuota	7.79	4.90	62.9	65.19 Jt
Bantuan UKT	0.75	0.75	100	347,11 Rb
Iuran JKP	1.55	-	-	-
Antisipasi perlinsos lainnya	1.94	-	-	-
TOTAL	186.64	142.63	76.4	

Real Perlinsos s.d. Q3: Rp117,30 T

PROGRAM PRIORITAS

Program	PAGU	REAL	%	Output
Program Padat Karya K/L	37.37	26.03	69.7	1,56 Jt pekerja
Pariwisata a.l. untuk KSPN, Ecowisata, serta pelatihan SDM	7.67	5.44	71.0	-
Ketahanan Pangan a.l. untuk program food estate dan irigasi	33.10	25.55	77.2	-
ICT a.l. untuk untuk penyediaan BTS sewa jaringan untuk pemutakhiran DTKS	16.66	11.39	68.4	-
Kawasan Industri	10.54	1.95	18.5	-
Dukungan Ekonomi Kreatif	2.28	0.13	5.7	-
Fasilitas Pinjaman Daerah	10.00	10	100	-
Program Prioritas lainnya a.l. untuk TKDN, OSS ATR dan Subsidi Bunga Pinjaman daerah	0.31	0.18	58.1	-
TOTAL	117.94	80.68	68.4	

Real Program Prioritas s.d. Q3: Rp62,50 T



Realisasi PEN 2021 mengalami peningkatan

Alokasi anggaran Insentif Usaha seluruhnya telah terserap



ENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DUKUNGAN UMKM DAN KORPORASI

PROGRAM	PAGU	REAL	%	OUTPUT
Subsidi bunga UMKM KUR dan Non-KUR	42.17	23.58	55.9	Realisasi KUR 266.2 T (7,0 Jt debitur)
BPUM (Unit Usaha)	15.36	15.36	100	12,8 Jt
Bantuan PKL	1.20	1.20	100	1 Jt
IJP UMKM dan Korporasi	5.66	2.51	44.4	-
- IJP UMKM (Debitur)	2.73	2.39	87.4	2,33 Jt debitur
- IJP Korporasi (Debitur)	2.87	0.12	4.3	43 debitur
- IJP BUMN (Debitur)	0.06	-	-	-
Penjaminan Loss Limit UMKM dan Korporasi	2.00	2.00	100	-
Pembebasan Rekmin, Biaya Beban, dan Abonemen (Jan-Des)	2.11	1.91	90.8	1,15 Jt pelanggan
PMN untuk 6 BUMN, LPEI, dan SWF/LPI	63.66	23.39	17.6	HK, Pelindo III, KIW, dan LPI
Penempatan Dana untuk restrukturisasi kredit perbankan	30.25	15.55	51.4	5,48 Jt debitur
TOTAL	162.40	85.50	52.6	

Real Dukungan UMKM dan Korporasi s.d. Q3: Rp66,69 T

INSENTIF USAHA

PROGRAM	PAGU	REAL	%	OUTPUT (WP)
PPh 21 DTP	5.16	3.62	70.2	87 Rb
PPh Final UMKM DTP	1.42	0.77	54.2	134,5 Rb
PPnBM DTP Kendaraan Bermotor	3.46	2.91	84.2	6
BM DTP	0.49	0.17	34.9	-
PPN DTP Perumahan	3.31	0.79	23.9	941
Pembebasan PPh 22 Impor	13.35	17.44	130.6	9,57 Rb
Pengurangan Angsuran PPh 25	20.49	25.14	122.7	57,9 Rb
Pengembalian Pendahuluan PPN	6.48	5.99	92.4	2,71 Rb
Penurunan Tarif PPh Badan	6.53	6.84	104.8	-
PPN tidak dipungut KITE	0.004	-	-	-
PPh Final DTP P3TGAI	0.07	0.002	2.8	5
PPN DTP Sewa outlet	1.18	0.16	13.6	874
Carry over DTP Tahun 2020	0.88	-	-	-
TOTAL	62.83	63.84	101.6	

Real Insentif Usaha s.d. Q3: Rp59,41 T



Perkembangan Realisasi Belanja Kesehatan Earmark TKDD - Nasional

Earmarked TKDD Untuk Penanganan Covid-19 telah terserap sebesar 61,55%



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Komponen	Anggaran dlm APBD (Miliar Rp)	Realisasi APBD (Miliar Rp)	% Realisasi/ Anggaran	Penyaluran TKDD (Miliar Rp)	% Realisasi/ Penyaluran
I	Penggunaan Earmarking DAU/DBH untuk Penanganan Covid-19 (8% dari Pagu DAU/DBH) *	39.896,43	19.596,99	49,12%	383.546,80	5,11%
1	Penanganan Covid-19	14.071,97	6.965,48	49,50%		
2	Dukungan vaksinasi **	6.344,66	1.839,33	28,99%		
3	Dukungan pada kelurahan	1.088,29	548,38	50,39%		
4	Insentif Tenaga Kesehatan	9.604,61	6.145,98	63,99%		
5	Belanja Kesehatan Lainnya dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat ***	8.786,90	4.097,81	46,64%		
II	Penyaluran DID untuk bidang Kesehatan termasuk Covid-19	5.895,37	5.882,86	99,79%	13.464,28	43,69%
III	Penyaluran Dana Desa untuk Covid-19 (8% dari Pagu Dana Desa)	5.760,00	5.758,79	99,98%	65.500,39	8,79%
IV	Penyaluran BOK untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19	3.300,00	2.521,56	76,41%	8.201,28	30,75%
	Total	54.851,80	33.760,19	61,55%	470.712,74	7,17%

*) Data anggaran dan realisasi yang disampaikan pemda ke DJPK per 3 Desember 2021

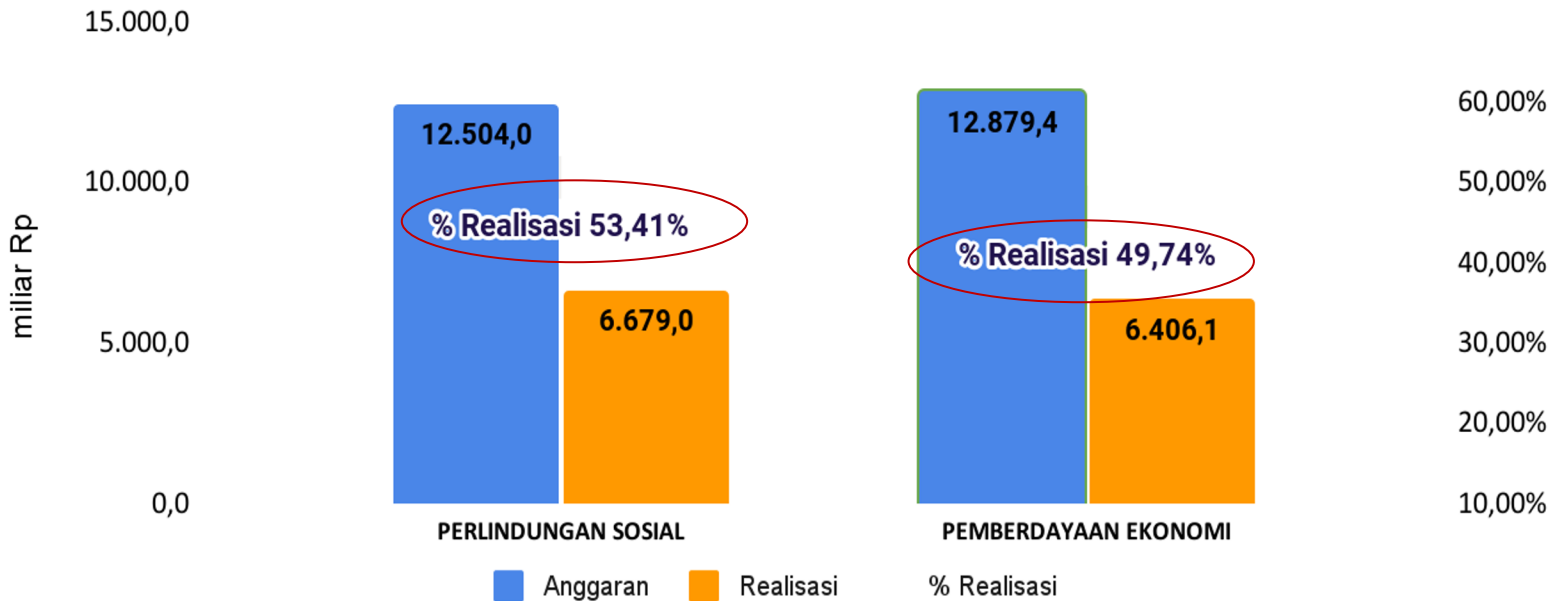
**) Termasuk intercept DAU untuk percepatan vaksinasi oleh vaksinator yang ditunjuk Pemerintah

***) Termasuk anggaran penebalan TNI/Polri dalam rangka PPKM

****) Data anggaran mengacu pada Rencana kegiatan final yang disampaikan Pemda



ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN DUKUNGAN EKONOMI YANG BERSUMBER DARI BELANJA WAJIB DTU



Sesuai Pasal 7 PMK No. 17 Tahun 2021, Pemda diwajibkan menganggarkan untuk **perlindungan sosial 20% dari belanja Wajib DTU**, dan untuk **dukungan pemulihan ekonomi 15% dari Belanja wajib DTU**.

Per 03 Desember 2021, total realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah sebesar Rp13,09 Triliun atau sebesar 51,55%, meliputi realisasi perlindungan sosial sebesar Rp6,68 Triliun (53,41%) dan realisasi dukungan ekonomi sebesar Rp6,41 Triliun (49,74%).

No	Komponen	Anggaran	Realisasi	%
A	PERLINDUNGAN SOSIAL	12.503,97	6.678,97	53,41%
1	Bantuan Sosial	6.931,70	3.692,50	53,27%
2	Pemberian Makanan Tambahan	518,24	209,21	40,37%
3	Perlindungan Sosial Lainnya	5.054,03	2.777,26	54,95%
B	PEMBERDAYAAN EKONOMI	12.879,43	6.406,09	49,74%
1	Pemberdayaan UMKM	2.208,49	1.039,88	47,09%
2	Subsidi Pertanian	1.917,42	837,19	43,66%
3	Pemberdayaan Ekonomi Lainnya	8.753,53	4.529,02	51,74%
JUMLAH PROGRAM PED MELALUI DTU		25.383,41	13.085,06	51,55%

Sumber: Laporan Realisasi Pemulihan Ekonomi Daerah, Data per 03 Des 2021 berdasarkan laporan daerah yang disampaikan pemda ke DJPK

Terima Kasih



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA